



**Veronica Kartika Indrawati, S.Sos., MA., M.E.Dev.**

Bappeda Kota Magelang

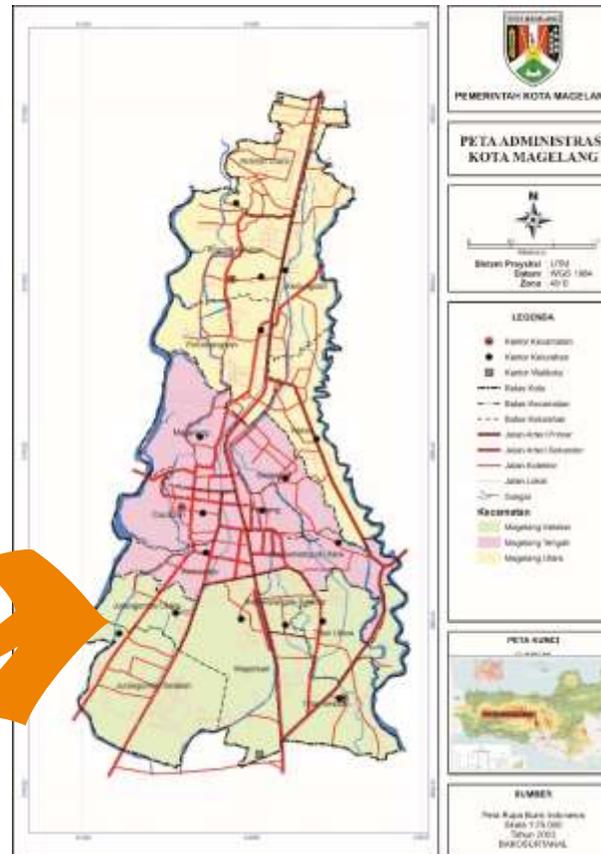
# STATISTIC GOES TO CAMPUS



**PERAN DATA TERBUKA DAN PARTISIPASI AKADEMISI DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAGELANG**

TERLETAK DI PROVINSI JAWA TENGAH ,  
TERKENAL DENGAN NAMA PAKUNING  
TANAH JAWA

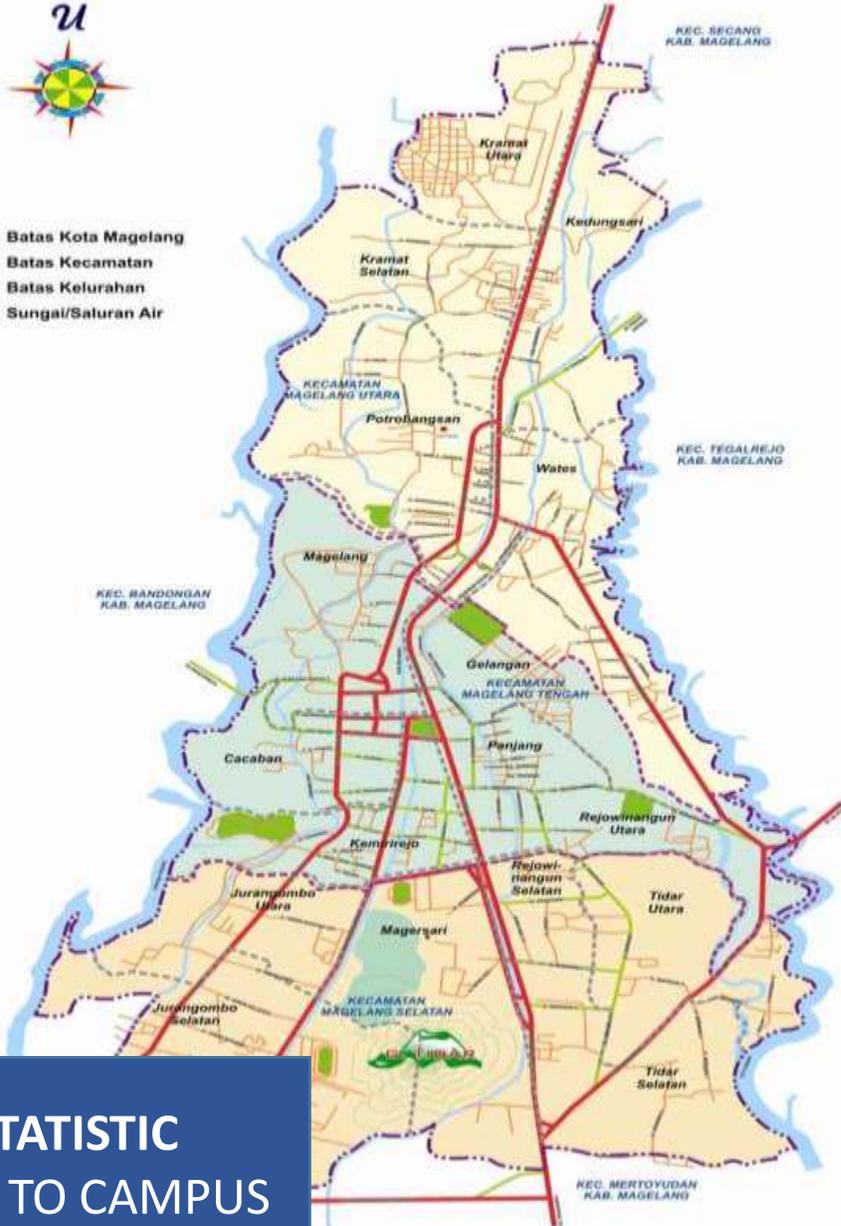
KETERBATASAN SUMBER DAYA  
ALAM, MENJADIKAN SEKTOR JASA  
SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN KOTA  
MAGELANG DALAM PEMBANGUNAN  
EKONOMINYA



## PEMBAGIAN WILAYAH 3 ADMINISTRASI KECAMATAN KOTA MAGELANG



- Batas Kota Magelang
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Sungai/Saluran Air



STATISTIC  
GOES TO CAMPUS

# KOTA MAGELANG

- BERDASARKAN PERMENDAGRI NO., 54/2017 LUAS WILAYAH 18,53 KM<sup>2</sup>
  - 3 KECAMATAN
  - 17 KELURAHAN

- DATA DEMOGRAFI VERSI BPS 2017 :
- JUMLAH PENDUDUK 121.992 Jiwa
    - LAKI-LAKI : 61.928 Jiwa
    - PEREMPUAN : 60.064 Jiwa
  - KEPADATAN PENDUDUK 6.583 Jiwa/KM<sup>2</sup>
  - DEPENDENCY RATIO 41,80%



**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
*di* **KOTA SEJUTA BUNGA**

## DASAR HUKUM

**UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004** TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

**UU NO 23 TAHUN 2014** TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008** TENTANG TAHAPAN, TATA CARA, PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017** TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

**PERDA NOMOR 4 TAHUN 2009 KOTA MAGELANG** TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP-D) 2005-2025

**PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 KOTA MAGELANG** TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021



**MEWUJUDKAN MAGELANG SEBAGAI  
KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS  
DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS**



1

**Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi**

2

**Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.**

3

**Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**

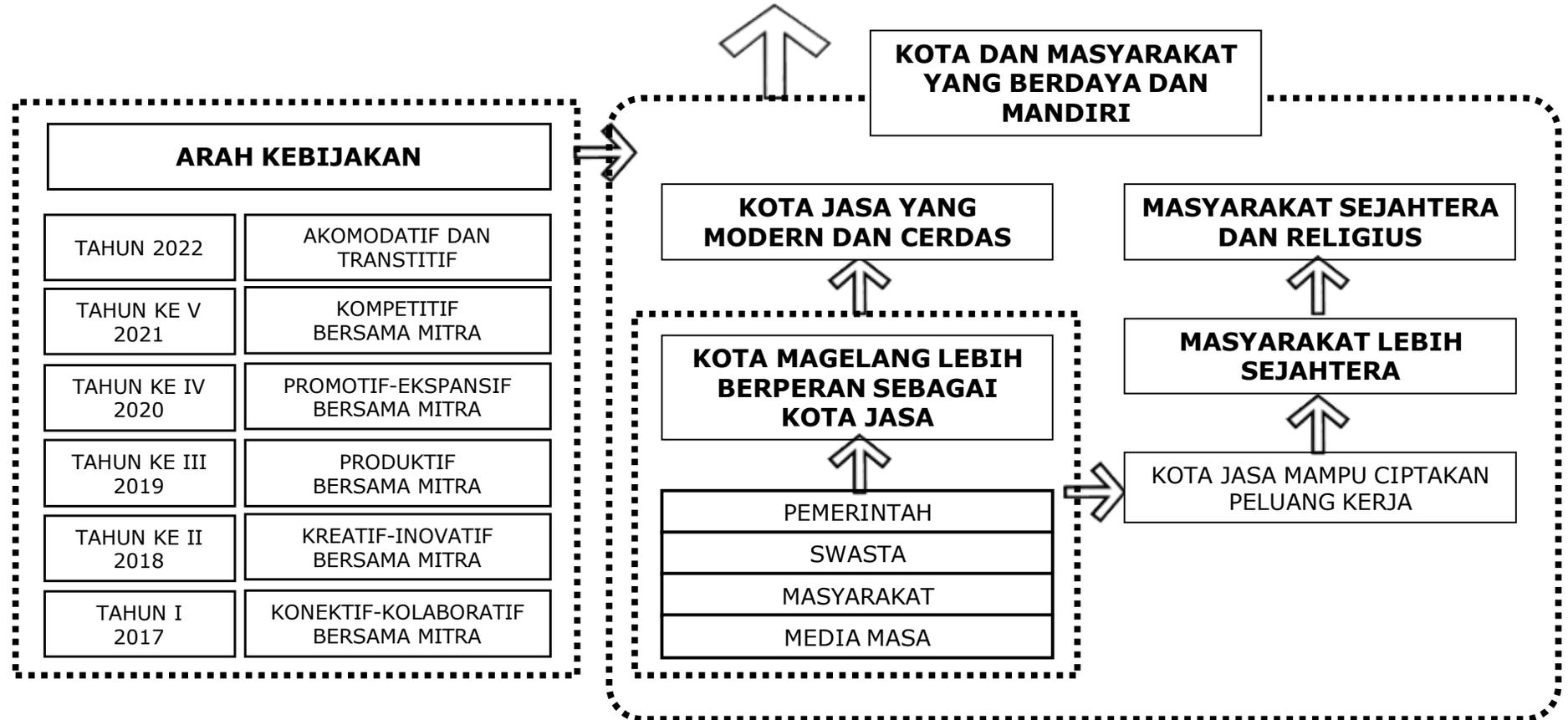
4

**Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.**

5

**Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.**

**KOTA MAGELANG YANG NGREJEKENI, NGAYOMI, NGAYEMI,  
HANDARBENI, MARISI, NGANGENI**





## URUSAN PEMERINTAHAN

- FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN;
- Urusan pendidikan;
- Urusan kesehatan
- Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Urusan sosial;
- Urusan penanaman modal;
- Urusan komunikasi dan informatika;
- Urusan perdagangan;
- Urusan perindustrian;
- Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Urusan kebudayaan;
- Urusan pariwisata;
- Urusan pertanian;
- Urusan kepemudaan dan olah raga;
- Urusan perikanan dan kelautan.

## URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM UNGGULAN

### PROGRAM UNGGULAN

- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PEMERINTAH;
- PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH;
- PROGRAM KOTA CERDAS;
- PROGRAM PEMERINTAHAN RESPONSIF DAN PARTISIPASIF;
- PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENURUNAN KEMISKINAN;
- PROGRAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN AMAN, SEHAT, BERKELANJUTAN;
- PROGRAM PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI;
- PROGRAM PERLUASAN PELUANG KERJA DALAM BIDANG PELAYANAN JASA PEREKONOMIAN, JASA KESEHATAN DAN JASA PENDIDIKAN;
- PROGRAM MASYARAKAT RELIGIUS MENUJU MASYARAKAT MADANI.



| NO | INDIKATOR KINERJA                          | CAPAIAN        | CAPAIAN          |
|----|--|----------------|------------------|
|    |  | 2017           | 2018             |
| I  | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi |                |                  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                        | 5.11%          | 5.21%***         |
| 2  | PDRB per Kapita (ADHK, Rp/kapita/tahun)    | 5.804.311,98** | 6.106.575,37***  |
|    | PDRB per Kapita (ADHB, Rp/kapita/tahun)    | 7.638.607,53** | 8.280.985,32 *** |
| 3  | Laju Inflasi                               | 3.22%          | 2.65             |
| 4  | Indeks Gini (2015: 0.34)                   |                | 0,328*           |
| II | Fokus Kesejahteraan Sosial                 |                |                  |
| 1  | Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan       | 8.75%          | 7.87%            |
| 2  | Indeks Pembangunan Manusia                 | 77,84          | 78,35*           |
|    | a Rata-rata lama sekolah                   | 10,30          | 10,29*           |
|    | b Harapan Lama Sekolah                     | 13,79          | 14,29*           |
|    | c Angka Harapan Hidup                      | 76,66          | 76,80*           |
|    | d Pengeluaran per Kapita (Rp.)             | 11.525         | 11,742*          |
| 3  | Indeks Pembangunan Gender                  | 96,26          | 96,98*           |
| 4  | Indeks Pemberdayaan Gender                 | 76,28          | 77,83            |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)         | 6.68%          | 4.88%            |
| 6  | Angka Pertumbuhan Penduduk                 | 0.31%          | 0,26%            |

| Indikator                              | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>          | 120.615 | 120.952 | 121.293 | 121.673 | 121.992 |
| <b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>   | 11.019  | 10.950  | 10.640  | 10.646  | 9.590   |
| <b>Jumlah Penduduk Miskin (%) (P0)</b> | 9,14    | 9.05    | 8.79    | 8.75    | 7.87    |
| <b>Indeks Kedalaman (P1)</b>           | 0,94    | 1.39    | 1.20    | 1.30    | 1.07    |
| <b>Indeks Keparahan (P2)</b>           | 0,20    | 0.31    | 0.23    | 0.32    | 0.21    |
| <b>Garis Kemiskinan</b>                | 376.143 | 405.228 | 425.191 | 450.908 | 476.582 |

Sumber: BPS

ANGKA KEMISKINAN TURUN 0,88% JAUH LEBIH BAIK DIBANDING 2017, NAMUN MASIH DI BAWAH TARGET TAHUN 2018 : 7,38-6,98%

P1 turun 0,23 poin menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan.

P2 turun 0,11 poin menunjukkan ketimpangan (gap) antar penduduk miskin semakin sedikit

Meskipun GK naik signifikan, namun P0, P1 dan P2 memiliki trend bagus, hal ini menunjukkan masyarakat miskin kota magelang semakin menuju ke kehidupan yang sejahtera

Secara umum penyebab penurunan P0 di tahun 2018 menurut BPS antara lain karena :

- rendahnya inflasi,
- naiknya UMK yang persentasenya lebih tinggi dari laju inflasi,
- lancarnya penyaluran BPNT, dan
- nilai tukar petani yang naik.

# DATA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

COLE NUSSBAUM

## Data storytelling



Generare valore  
dalla rappresentazione  
delle informazioni

APGEO

*"Torture the data, and it will  
confess to anything."*

*Ronald Coase, winner of the  
Nobel Prize in Economics*

"Data really powers everything that we do." – Jeff Weiner  
(data memberi kekuatan bagi semua yang kita laksanakan)

# PERAN STATISTIK DAN DATA DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Data Hasil Evaluasi

CONTROLLING  
(MONITORING/  
EVALUASI)

PLANNING  
(PERENCANAAN)

ACTUATING  
(PELAKSANAAN)

ORGANIZING

Pengumpulan Data

Identifikasi dan  
Analisis Permasalahan

Penentuan Target

Evaluasi Capaian

**UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004  
TENTANG SISTEM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL BAB VII PASAL 31  
YANG MENYATAKAN BAHWA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DIDASARKAN PADA DATA/  
INFORMASI YANG AKURAT DAN DAPAT  
DIPERTANGGUNG JAWABKAN.**

## **DASAR HUKUM**

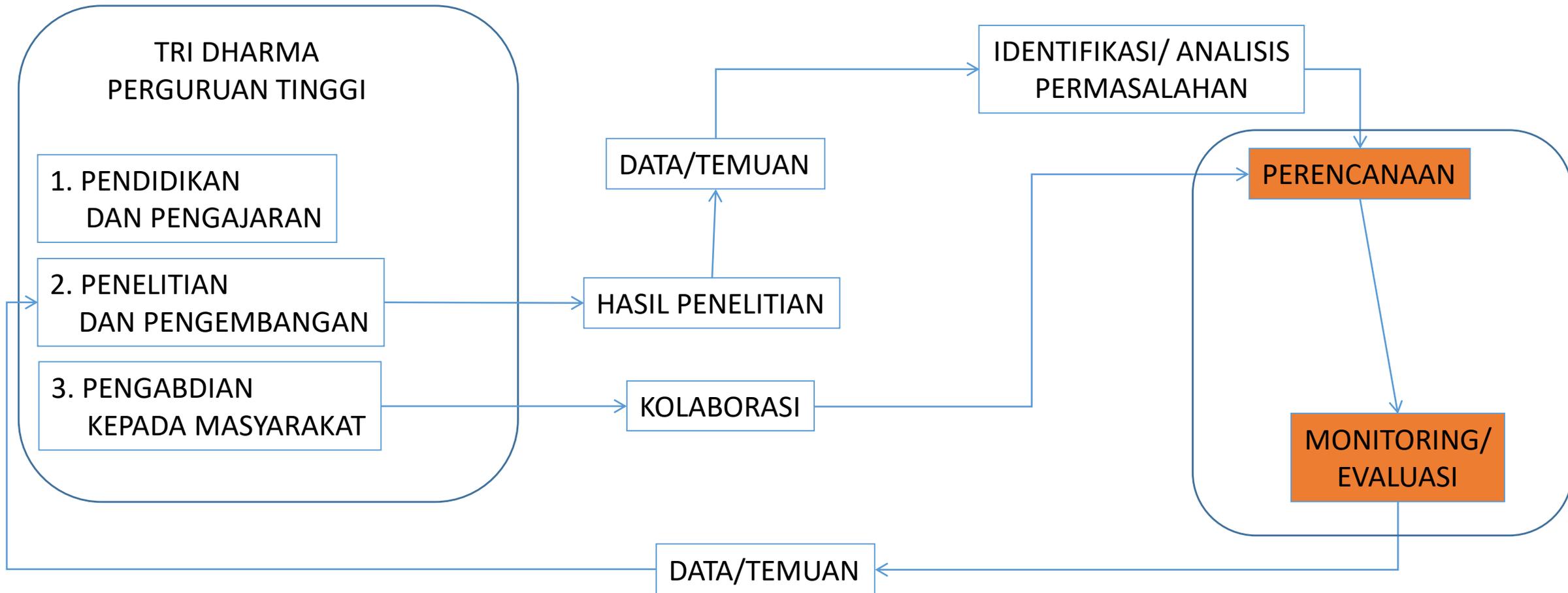
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2017  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BERTUJUAN UNTUK  
MEWUJUDKAN KESESUAIAN ANTARA CAPAIAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN INDIKATOR KINERJA  
YANG TELAH DITETAPKAN.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
86 TAHUN 2017 PASAL 13 AYAT 1 BAHWA:  
"PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH MENGGUNAKAN DATA DAN  
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH SERTA RENCANA TATA RUANG".**

## UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMKOT MAGELANG DALAM MENDUKUNG KETERBUKAAN DATA

- Berkomitmen mensukseskan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat guna, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan efisien dalam penggunaan anggaran.
- Menyediakan Portal Data Terbuka (yang bisa diakses pada laman: <http://datago.magelangkota.go.id/> dan <http://data.magelangkota.go.id>) untuk mendukung ketersediaan dan transparansi data sektoral yang terintegrasi dalam portal Provinsi dan Portal SDI di bawah koordinasi Kantor Staf Presiden RI.
- Membentuk Forum Data.
- Membentuk Peraturan Daerah tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

# PERAN DATA DAN AKADEMISI DALAM PROSES PERENCANAAN



# TERIMA KASIH

